

EKSPRESI KERUANGAN BUDAYA LOKAL: Tinjauan Diakronik Spasial Permukiman Desa Adat Kesiman, Denpasar – Bali

I Komang Gede Santhyasa¹⁾
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota - FT, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: santhyasa@yahoo.com

Abstrak

Perencanaan ruang pada lingkungan masyarakat 'tradisional' lebih didasarkan pada sistem pengetahuan lokal tentang perencanaan yang terdiri atas sistem nilai dan konsep lokal, serta kepercayaan dan pengetahuan budaya setempat. Banyak sistem pengetahuan lokal tentang perencanaan tata ruang yang memiliki peranan dalam usaha menjaga kontinuitas dimensi kultural yang seringkali diabaikan oleh perencanaan. Khususnya dalam kasus Bali, secara etnis-kultural yang cenderung homogen, usaha untuk menjaga kelestarian budaya inti tersebut merupakan konsepsi yang mendasar bagi masyarakat Bali dan merupakan landasan dasar sebagai sistem perencanaan ruang. Permukiman Desa Adat Kesiman sebagai studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan pola spasialnya ditinjau dari perspektif diakronik spasial. Tulisan ini menggambarkan secara ringkas bahwa perkembangan pola spasial ini ditujukan untuk lebih memahami landasan yang dijadikan dasar dalam usaha-usaha penciptaan ekspresi keruangan budaya lokal dan dijadikan referensi dalam perencanaan ruang pada lingkungan tradisional yang dibangkitkan oleh konteks budayanya.

Kata Kunci – tradisional, kultural, spasial, diakronik

I. PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam pengkajian ruang adalah terkait dengan tatanan ruang yang menggambarkan juga tatanan kehidupan masyarakat. Tatanan ruang tersebut akan terorganisasi dalam pola tertentu yang dapat dimaknai sesuai dengan budaya masing-masing. Untuk itulah, maka organisasi ruang juga menggambarkan atau melambangkan pengertian untuk dapat 'dibaca' dalam pengertian tertentu sebagai struktur ruang (Sasongko, 2003).

Pemahaman dalam penciptaan tempat hidup manusia beserta atribut yang menyertainya adalah suatu kebutuhan manusia. Jika tempat hidup manusia atau tempat bermukim manusia merupakan wadah untuk secara konkrit mengekspresikan eksistensi dirinya (Norberg-Schulz, 1971), maka perencanaan ruang adalah sebagai usaha untuk secara lebih akurat mengakomodasi norma dan nilai-nilai kosmologis dalam pembentukan identitas ruang bermukim, yang dalam hal ini sebagai ruang masyarakat tradisional (Santhyasa, 2007).

Pada saat ini, penetapan unit perancangan di kota yang berlaku dalam sistem perencanaan kota di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan wilayah administratif. Seperti misalnya, wilayah kelurahan, wilayah kecamatan, dan kota termasuk juga penetapan dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah fungsional perkotaan, seperti kawasan pusat kota, kawasan industri, kawasan bersejarah, dan lain sebagainya. Walaupun secara hukum, mengakui masyarakat hukum adat sebagai salah satu stakeholder pembangunan ruang perkotaan, unit spasio-kultural yang secara tradisional ada di Indonesia. Seperti misalnya, desa adat, gampong, nagari, dan lain sebagainya tidak pernah dimanfaatkan ataupun dipikirkan untuk digunakan sebagai suatu unit perancangan (Samadhi, 2003).

Rapoport (1969), menunjukkan bahwa budaya akan selalu berubah, sehingga makna bangunan maupun permukiman juga dapat berubah. Hanya saja perubahan tersebut tidaklah selalu terjadi secara serentak dan pada seluruh elemen ataupun tatanannya, akan tetapi selalu dijumpai adanya unsur yang berubah dan yang tetap (constancy and change). Dalam konteks ini, apabila budaya atau pandangan hidup berubah, maka berbagai aspek terkait dengannya menjadi berubah atau tidak

berarti, walaupun demikian masih akan dijumpai berbagai elemen yang tetap dipertahankan, hanya secara umum kecenderungannya untuk berubah lebih kuat dari upaya mempertahankannya. Dengan demikian, Permukiman Desa Adat Kesiman sebagai studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan pola spasialnya ditinjau dari perspektif diakronik spasial. Tulisan ini memberikan gambaran secara ringkas bahwa perkembangan pola spasial ini ditujukan untuk lebih memahami landasan yang dijadikan dasar dalam usaha-usaha penciptaan ekspresi keruangan lokal dan dijadikan referensi dalam perencanaan ruang pada lingkungan masyarakat 'tradisional' yang dibangkitkan oleh konteks budayanya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PERUBAHAN LINGKUNGAN BINAAN SEBAGAI MANIFESTASI NILAI SOSIAL - BUDAYA

Pada dasarnya perubahan yang dilakukan manusia bertujuan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dan memuaskan. Bentuk perubahan kebudayaan dapat bermacam-macam antara lain: perubahan yang berlangsung lambat dan ada pula yang cepat, perubahan yang direncanakan (dikehendaki) dan perubahan yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki), perubahan yang pengaruhnya besar dan yang pengaruhnya kecil. Perubahan budaya pada umumnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang menerima perubahan tetapi hal ini dapat diamati oleh orang luar.

Perubahan dan pembaharuan kebudayaan dibenarkan dan dimungkinkan karena pada hakekatnya kebudayaan tidak diciptakan cuma sekali dan langsung selesai, tetapi diciptakan terus-menerus. Perubahan kebudayaan ada yang terjadi pada wujud fisik, sistem sosial serta ada pula pada wujud sistem idenya. Sejalan dengan perkembangan waktu, fungsi bangunan dan lingkungan kawasan permukiman, telah mengalami perubahan secara fisik dan non fisik, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perubahan kegiatan ekonomi, perubahan sistem politik, sosial dan budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap bentuk spasial lingkungan permukiman (Erwin, 1999).

Lebih lanjut menurut Hatmoko (1994), bahwa kebudayaan pada dasarnya memiliki sifat sebagai sesuatu yang berubah, karena kebudayaan memiliki aspek tradisi, yaitu sesuatu yang diwariskan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan tidaklah bersifat statis dan mandek begitu saja, namun dalam menjaga tradisi diperlukan juga untuk melihat relevansinya untuk masa kini dan masa yang akan datang bagi upaya pelestarian.

Lingkungan binaan sebagai hasil wujud fisik kebudayaan merupakan hasil dari kompleks gagasan yang merupakan satu kesatuan sistem budaya yang tercermin pada kompleks aktivitas yang berpola dalam suatu keseluruhan sistem sosial masyarakat, yang sering disebut sebagai 'kebudayaan fisik'. Menurut Koentjaraningrat (1987), ada tiga wujud kebudayaan, yakni *cultural system* (berupa sistem nilai, norma-norma dan perangkat aturan), *social system* (wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas), *physical system* (wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia).

Ketiga wujud kebudayaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem, yang akan selalu mencari keseimbangan apabila salah satu sub-sistemnya mengalami perubahan dengan perubahan pada sub-sistem lainnya. Dengan demikian, lingkungan permukiman sebagai lingkungan binaan manusia, proses dan komponen penyusunannya tidak dapat terlepas dari masalah kondisi sosial budaya masyarakatnya.

Terbentuknya lingkungan hunian dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia, serta adanya pengaruh *setting* (rona lingkungan), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (sosial-budaya), yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewartannya (Santhayasa, 2005). Rona lingkungan akan saling berpengaruh dengan bentuk fisik lingkungan binaan. Rona lingkungan terbentuk oleh kondisi lokasi, kelompok masyarakat dengan sosial-budayanya (Rapoport, 1983).

Sebagai suatu proses, perubahan lingkungan binaan tentunya berjalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat. Rapoport (1969), membedakan faktor-faktor pembentuk lingkungan (hunian) ke dalam dua golongan, faktor primer (*social-culture factors*)

3) Periode 3, sejak kolonialisme sampai sekarang (abad ke-20an)



Gambar 2. Elemen-elemen ruang kota di Desa Adat Kesiman
Sumber: Pengamatan Lapangan (2010)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

DIAKRONIK SPASIAL PERMUKIMAN DESA ADAT KESIMAN

Desa Adat Kesiman terletak 3 km di sebelah timur laut wilayah Kota Denpasar dilintasi oleh jalan lingkar dalam kota (*inner ring road*). Desa adat ini meliputi tiga desa dinas, yaitu Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, dan Desa Kesiman Kertalangu. Secara geografis Desa Adat Kesiman memiliki batas-batas wilayah desa, yaitu sebelah utara adalah Desa Adat Tembau, Bekul, Oongan, dan Tonja; sebelah timur Desa Adat Tegehe dan Batubulan; sebelah selatan Desa Adat Sanur dan Tanjung Bungkak; dan sebelah barat adalah Desa Adat Sumerta.

Struktur desa adat ini, terdiri dari tiga komponen dasar seperti desa adat lainnya, yaitu *parahyangan* (tempat suci Hindu-Bali, seperti: *Pura Puseh/Desa, Pura Dalem*, dan pura-pura lainnya), *palemahan* (wilayah teritorial desa adat), dan *pawongan* (warga desa adat). Menurut sejarahnya, Desa Adat Kesiman telah ada sejak jaman Bali Kuna ketika dinasti Warmadewa berkuasa di Bali. Desa ini kemudian jatuh ke tangan kekuasaan Majapahit (ketika Gajah Mada menaklukkan Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten), dan berkembang sampai era kemerdekaan dan pembangunan sekarang.

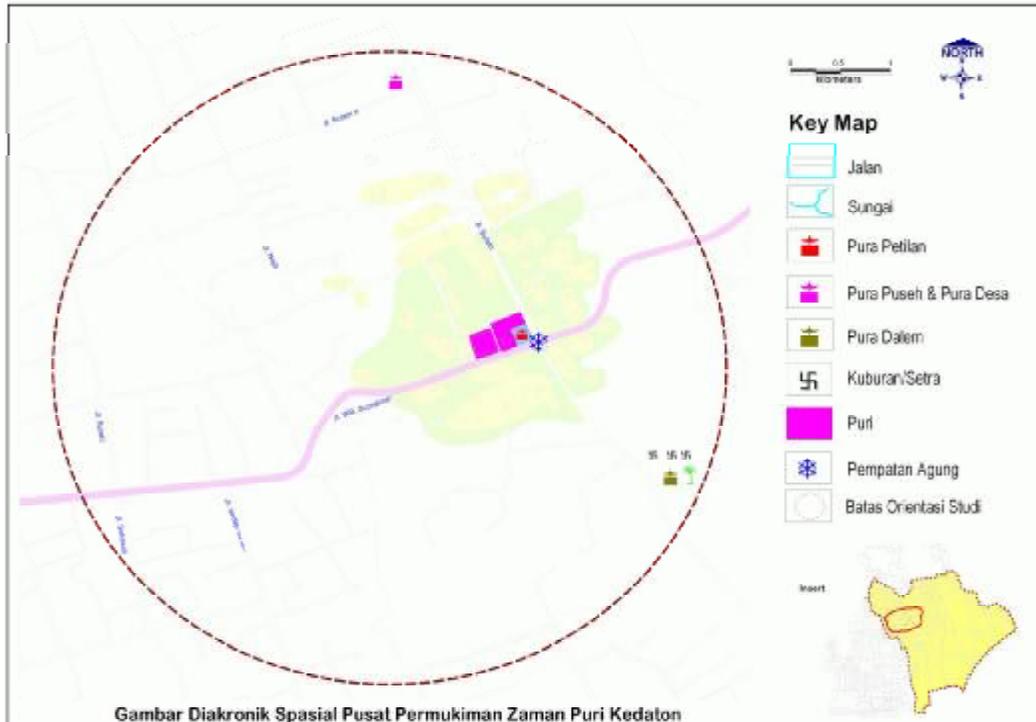
Diakronik Spasial Jaman Puri Kedaton (abad ke-17)

Pada periode ini dapat dikategorikan dalam periode awal perkembangan spasial Desa Adat Kesiman. Pada jaman ini, kompleks *Puri Kedaton* menjadi titik pusat lingkungan permukiman. Pusat ini ditandai dengan adanya *pampatan agung* atau persimpangan jalan (*catus patha*) sebagai simbol kultural secara spasial. *Puri Kedaton* terletak disudut barat laut *pampatan agung* berdekatan dengan *Pura Petilan* (pura yang dibangun oleh keluarga *Puri Kedaton* sebagai cikal bakal Desa Adat Kesiman saat ini).

Secara tatanan spasial juga terlihat jelas, bahwa pola ruang desa adat yang berorientasi pada konsep *sanga mandala* mulai diterapkan dengan dibangunnya *kahyangan desa* (*Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem*) sebagai penanda batas teritorial wilayah desa adat. *Pura Desa* dan *Pura Puseh* yang berada di ujung utara desa (*utama*) sedangkan *Pura Dalem* dan Kuburan di ujung selatan desa

(*nista*) dan permukiman berada di tengah-tengah desa dengan *puri* sebagai pusat lingkungan permukiman desa adat.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini (jaman *Puri Kedaton*) lebih didominasi pada pembangunan banyaknya pura-pura dari berbagai kasta (*soroh*) di sekitar kompleks *Puri Kedaton* yang berorientasi pada aktivitas ritual-ritual keagamaan (Gambar 3).



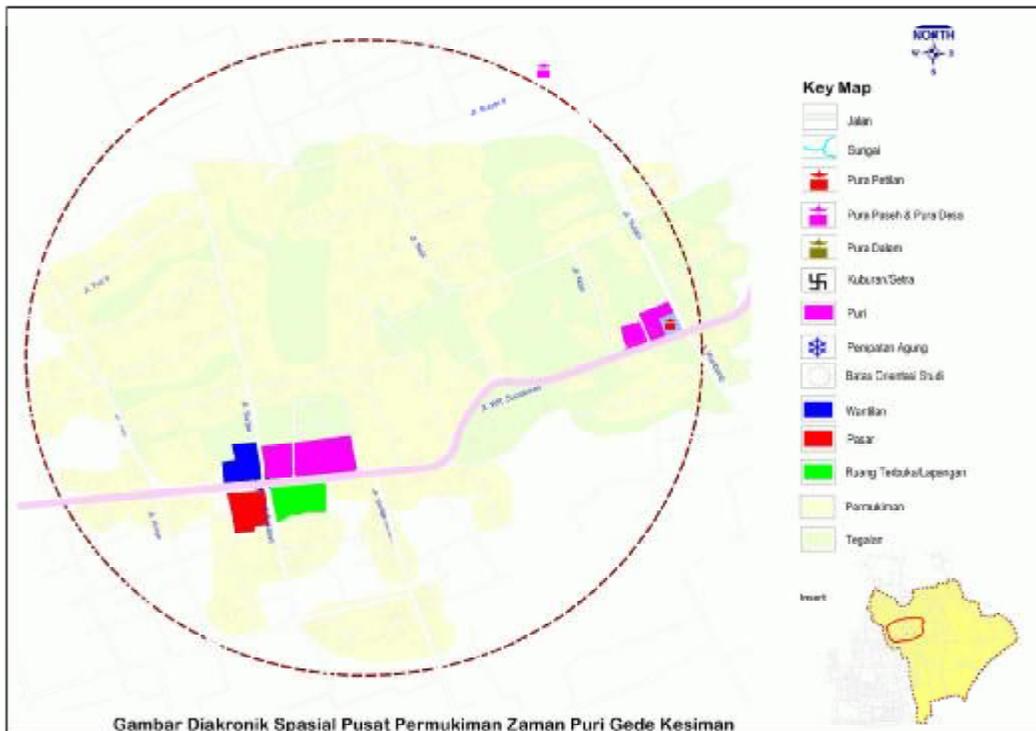
Gambar 3. Diakronik Spasial Pusat Permukiman Desa Adat Kesiman pada Jaman Puri Kedaton
Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

Diakronik Spasial Jaman Puri Gede Kesiman (abad ke-18)

Pada periode ini, *puri* dibangun kembali sebagai istana kerajaan masa *Puri Gede Kesiman* yang letaknya di sebelah barat *Puri Kedaton*. Walaupun demikian, tatanan spasial yang telah terbangun pada masa *Puri Kedaton* tidak mengalami perubahan, seperti letak pura-pura kahyangan desa masih berada pada lokasi semula. Namun, *Puri Kedaton* yang dulunya oleh masyarakat dijadikan pusat orientasi lingkungan permukiman, pada periode ini berpindah orientasi sebagai pusat lingkungan permukiman adalah *Puri Gede Kesiman*.

Keruangan *pempatan agung* yang terbentuk pada periode ini dapat dikatakan pola spasial yang ideal karena di empat kuadran *pempatan agung* dibangun fungsi-fungsi dan bentuk ruang yang sesuai dengan tata ruang tradisional Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan *puri* terletak di sebelah timur laut *pempatan agung*, pasar di sebelah tenggara *pempatan agung*, ruang terbuka berada di sebelah barat daya *pempatan agung*, dan *wantilan* berada di sebelah barat laut *pempatan agung*.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini (jaman *Puri Gede Kesiman*), didominasi pada pengkonsentrasian fungsi spasial yang bersifat publik (kegiatan agama, sosial, ekonomi, dan politik) di pusat wilayah kerajaan (Gambar 4).

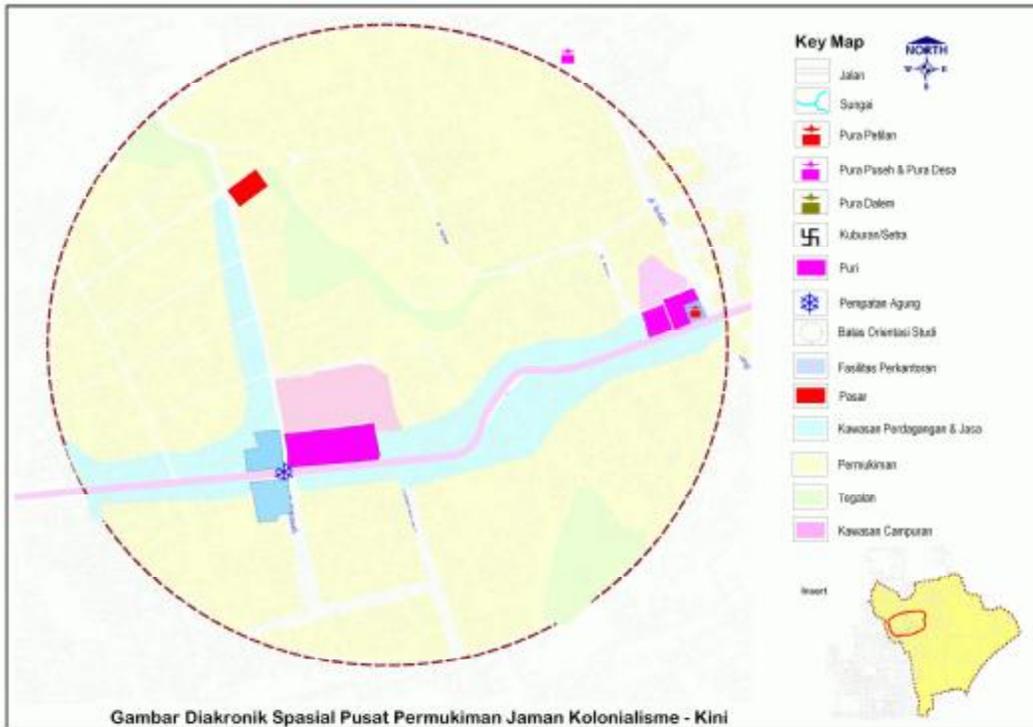


Gambar 4. Diakronik Spasial Pusat Permukiman Desa Adat Kesiman pada Jaman Puri Gede Kesiman. Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

Diakronik Spasial Sejak Kolonialisme sampai Sekarang (abad ke-20an)

Pada periode ini, pola spasial *kahyangan desa* dan spasial *pampatan agung* tidak mengalami perubahan. Perkembangan diakronik yang terjadi pada periode sejak kolonialisme sampai sekarang adalah disekitar spasial *pampatan agung* terjadi perubahan pemanfaatan ruang dari elemen-elemen seperti pasar, *wantilan*, dan ruang terbuka menjadi pemanfaatan ruang lebih bernuansa moderen kecuali elemen puri masih tetap bertahan, sedangkan pasar sekarang terletak di sebelah utara pampatan agung, tepatnya di ujung utara koridor Jalan Surabi. Walaupun demikian, secara fisik spasial puri tidak lagi dominan dalam pengembangan pusat lingkungan permukiman desa adat.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini lebih menegaskan bahwa kawasan bekas pusat kerajaan berubah menjadi kawasan bisnis dan perkantoran dengan dibuktikan sampai saat ini di sekitar spasial pampatan agung adanya kantor-kantor pemerintahan seperti kantor camat, kantor lurah dan berbagai fasilitas-fasilitas bisnis yang berada di sepanjang Jalan Supratman (Gambar 5). Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan wajah visual desa adat dari lansekap tradisional yang alami menjadi artifisial (lebih moderen).



Gambar 5. Diakronik Spasial Pusat Permukiman Desa Adat Kesiman Jaman Kolonialisme-Kini
Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

Tabel 1. Matrik Diakronik Spasial Desa Adat Kesiman

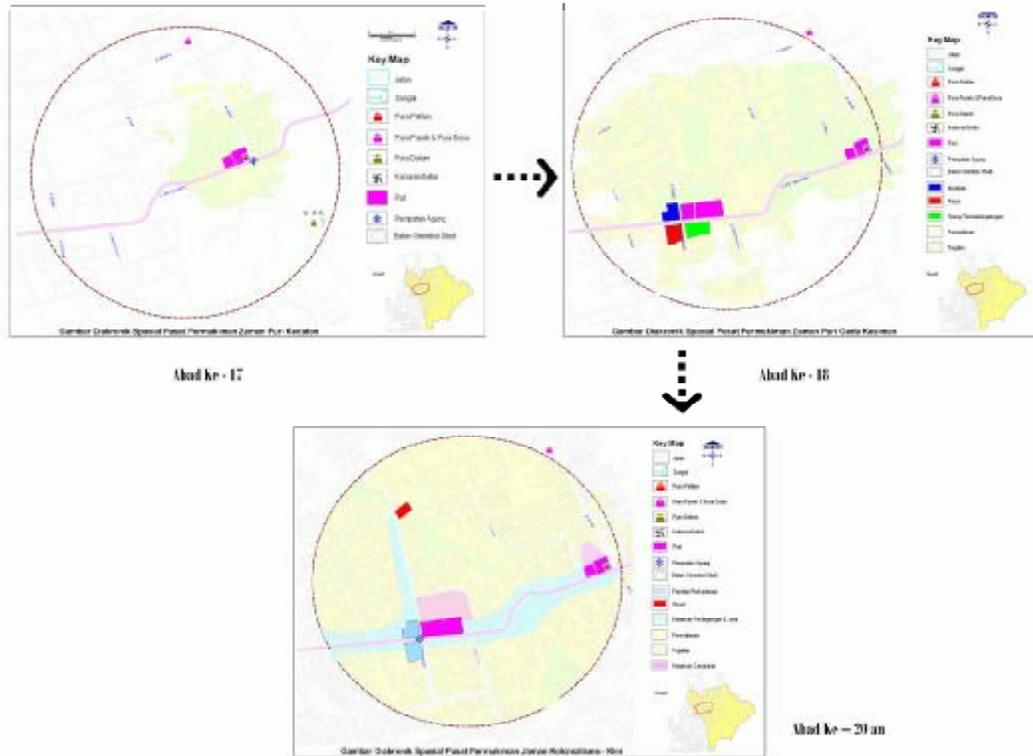
1.1 No	1.2 Elemen fisik	1.3 Masa/periode		
		1.4 Jaman Puri Kedaton	1.5 Jaman Puri Gede Kesiman	1.6 Jaman kolonialisme-kini
1.7 1.	1.8 Pampatan Agung	1.9 Puri	1.10 Puri	1.11 Puri
		1.12 Pura Petilan	1.13 Pasar	1.14 Hotel dan toko
		1.15	1.16 Ruang terbuka	1.17 Kantor kelurahan
		1.18	1.19 Wantilan	1.20 Kantor camat
1.21 2.	1.22 Kahyangan Desa	1.23 Pura Desa	1.24 Pura Desa	1.25 Pura Desa
		1.26 Pura Puseh	1.27 Pura Puseh	1.28 Pura Puseh
		1.29 Pura Dalem	1.30 Pura Dalem	1.31 Pura Dalem
1.32 3.	1.33 Permukiman	1.34 Pura-Pura Warga	1.35 Pura-Pura Warga	1.36 Pura Petilan dan Pura-Pura Warga
		1.37	1.38	1.39 Bale Banjar
		1.40	1.41	1.42 Pasar Yadnya
		1.43	1.44	1.45 Pertokoan
		1.46	1.47	1.48 Kuburan

Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

Tabel 2. Tema-tema yang Terdapat Dalam Topik Diakronik Spasial Desa Adat Kesiman

1.49 Periode	1.50 Unit Informasi	1.51 Tema-tema
1.52 Puri Kedaton	a) Pada jaman ini, kompleks Puri Kedaton menjadi titik/pusat lingkungan permukiman. b) Pusat ini ditandai dengan adanya pampatan agung/persimpangan jalan (<i>catus patha</i>) sebagai simbol kultural secara spasial. c) Pola ruang desa adat yang berorientasi pada konsep sanga mandala mulai diterapkan dengan dibangunnya kahyangan desa. d) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini lebih didominasi pada pembangunan banyaknya pura-pura dari berbagai kasta/soroh di sekitar kompleks Puri Kedaton.	1) Pusat orientasi lingkungan tergantung pada kekuasaan. 2) Simbol ruang kultural yang kuat. 3) Orientasi aktivitas religi yang sangat kuat. 4) Pola spasial yang ideal (<i>teratur</i>). 5) Munculnya ruang-ruang publik. 6) Perubahan pola spasial. 7) Perubahan visual.
1.53 Puri Gede Kesiman	a) Puri Kedaton yang dulunya oleh masyarakat dijadikan pusat orientasi lingkungan permukiman, pada periode ini berpindah orientasi sebagai pusat lingkungan permukiman adalah Puri Gede Kesiman. b) Keruangan pampatan agung yang terbentuk pada periode ini dapat dikatakan pola spasial yang ideal karena di empat kuadran pampatan agung dibangun fungsi-fungsi dan bentuk ruang yang sesuai dengan tata ruang tradisional Bali. c) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini, didominasi pada pengkonsentrasian fungsi spasial yang bersifat publik	
1.54 Sejak kolonialisme sekarang	a) Secara fisik spasial puri tidak lagi dominan dalam pengembangan pusat lingkungan permukiman desa adat. b) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini lebih menegaskan bahwa kawasan bekas pusat kerajaan berubah menjadi kawasan bisnis dan perkantoran. c) Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan wajah visual desa adat dari lansekap tradisional yang alami menjadi artifisial (<i>lebih moderen</i>). d) Dalam perkembangan dengan berbagai perubahan pola spasial, fungsi, dan visualnya, namun keberadahan pampatan agung (<i>catus patha</i>) dengan fungsi kultural di lingkungan desa adat tetap bertahan hingga kini.	

Sumber: Diadaptasikan dari Santhayasa (2007)



Gambar 6. Perkembangan Diakronik Spasial Permukiman Desa Adat Kesiman
Sumber: Diadotasikan dari Santhyasa (2007)

IV. KESIMPULAN

Dalam konteks diakronik, perkembangan spasial di Desa Adat Kesiman dengan perubahan yang terjadi dalam prosesnya masih menunjukkan keberlanjutan ruang-ruang kultural sebagai simbol identitas keruangan budaya lokal (Tabel 2 dan Gambar 6). Hal ini ditunjukkan dengan simbol ruang kultural yang masih kuat, seperti masih bertahannya *pampatan agung (catus patha)* dengan fungsi kulturalnya, sehingga ruang, aktivitas, dan sistem nilai yang melekat pada ruang kultural *pampatan agung* masih tetap lestari. Keberlanjutan terhadap simbol identitas ini memberikan penekanan pada konsep tempat (*place*) sebagai suatu unit yang memiliki karakteristik unik tersendiri yang membedakan dengan tempat-tempat lain.

Dengan demikian, dimensi praktikal dalam usaha penciptaan tempat (*placemaking*) untuk memperoleh lingkungan bermukim yang mendukung budaya lokal bermukim penghuninya, adalah dengan menjadikan ekspresi keruangan lokal sebagai referensi dalam proses perancangan kota guna mewujudkan lingkungan bermukim yang *supportive*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erwin, B. (1999) Perubahan Spasial Lingkungan di Baluwarti Surakarta. *Jurnal Emas FT. UKI*, Tahun X, No.22: 109-129.
- [2] Hatmoko, A. U. (1994) Model Inventarisasi untuk Pelestarian Arsitektur pada Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Media Teknik*, Tahun XVI, No.3: 3-8
- [3] Koentjaraningrat. (1987). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia).
- [4] Norberg-Schulz (1971) *Existence, Space and Architecture* (New York: Praeger).
- [5] Rapoport, Amos (1969) *House Form and Culture* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall).
- [6] Rapoport, Amos. (1983). *Development, Culture Change and Supportive Design*. In (ed): *Action Planning and Responsive Design*. (New York: Pergamon Press).
- [7] Samadhi, T. Nirarta (2003) Merevitalisasi Tradisi: Mengadopsi Desa Adat di Bali sebagai Unit Perancangan Kota. *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, 27 (70): 77-92.
- [8] Santhayasa, I Komang Gede (2005) Memahami Pembentukan Ruang Permukiman Berdasarkan Konsepsi Tradisional-Religius (Studi Kasus: Permukiman Hindu di Dusun Jenglong-Malang). *Jurnal RUAS*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2005, : 19-29.
- [9] Santhayasa, I Komang Gede (2007) *Sistem Nilai Spasial Desa Adat Kesiman Pada Kawasan Perkotaan Denpasar*. Tesis Magister yang tidak dipublikasikan. (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya).
- [10] Sasongko, Ibnu (2003) Relasi Kuasa Dalam Struktur Ruang Permukiman: Kasus Permukiman Sasak. *Jurnal ASPI*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2003, : 29-40.
- [11] Suprijanto, Iwan (1999) Fenomenologi Melalui Sinkronik-Diakronik: Suatu Alternatif Pendekatan Untuk Menjelajahi Esensi Arsitektur Nusantara. *Prosiding Simposium Nasional, Dalam Rangka Dies 34 Arsitektur-FTSP ITS*, Surabaya 9-9-1999.